



PENGARUH ATRIBUT *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *INTELLECTUAL CAPITAL*

Aristya Kartikasari, Muchamad Syafruddin¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The aims of this study is to examine the influence of corporate governance attributes like board size, independent non-executive directors, family members on the board, board meetings, directors ownership, government ownership and institutional ownership on intellectual capital disclosure. Firm size, profitability, and leverage used as control variable.

The population in this study consists of all listed firms in Indonesia Stock Exchange in year 2011, 2012, and 2013. Sampling method used is purposive sampling. A criterion for firm which have a high level of market capitalization. Another criteria is the firm must have complete data on implementation of corporate governance, total data of this study is 89 data. Then, there is one sample that include outlier should be excluded from samples of observation. So, the final amounts of the sample are 88 data. Multiple regression used to be analysis techniques.

The empirical result of this study show that board size, board meetings, managerial ownership, government ownership and institutional ownership have positively significant influence on intellectual capital disclosure. Independent non-executive directors and family members on the board have no significant influence to intellectual capital disclosure.

Keywords: *intellectual capital disclosure, corporate governance, ownership structure patterns, annual reports.*

PENDAHULUAN

Pada era ekonomi berdasarkan pengetahuan, ketidakpuasan atas praktik pelaporan keuangan tradisional termasuk ketidakmampuan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemangku kepentingan perusahaan telah meningkat. Ketidakpuasan ini menyebabkan permintaan jenis informasi yang berbeda. Pelaporan keuangan tradisional tidak secara khusus mempertimbangkan pengungkapan informasi *intellectual capital* yang menggambarkan persentase signifikan dari nilai total perusahaan. Sebagai hasilnya, banyak perusahaan memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan untuk melengkapi pelaporan keuangan tradisional dengan informasi non-keuangan termasuk informasi *intellectual capital* (Abeysekera dan Guthrie, 2005).

Sesuai dengan penjelasan di bagian atas yang menyatakan bahwa laporan keuangan tradisional telah ditambah dengan informasi *intellectual capital*, banyak penelitian empiris dilakukan untuk menyelidiki praktik pengungkapan *intellectual capital* (Goh dan Lim, 2004; Cerbioni dan Parbonetti, 2007; Abeysekera, 2010). Beberapa penelitian melaporkan berbagai tingkat pengungkapan *intellectual capital* selama bertahun-tahun dengan menunjukkan peningkatan trend pengungkapan *intellectual capital*. Menurut Taylor dan Associates (dalam Nugroho, 2011) menunjukkan bahwa pengungkapan *intellectual capital* termasuk dalam sepuluh peringkat informasi teratas yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Goh dan Lim (2004) menyatakan bahwa informasi *intellectual capital* adalah salah satu informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan perusahaan, khususnya oleh investor, karena informasi mengenai *intellectual capital* menyebabkan investor dapat menilai kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Informasi

¹ Corresponding author



intellectual capital juga dirasakan berguna oleh penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam konteks negara berkembang (Ousama *et al.*, 2011).

Perkembangan pengungkapan *intellectual capital* di Indonesia masih sedikit. Hal ini disebabkan karena *intellectual capital* merupakan konsep pengetahuan yang masih baru dan terdapat kesulitan dalam melakukan pengukuran *intellectual capital* yang cenderung bersifat kualitatif. Oleh karena itu, terdapat kesulitan dalam pengimplementasian *intellectual capital* di perusahaan. *Intellectual capital* muncul sejak diterbitkannya PSAK No. 19 (revisi 2010) tentang aset tak berwujud, namun tidak disebutkan mengenai *intellectual capital* secara eksplisit. Menurut PSAK No. 19 (revisi 2010) aset tidak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan minim wujud fisik.

Pengungkapan *intellectual capital* dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela (*voluntary*). Belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi *intellectual capital* dalam laporan tahunannya. Hal inilah yang menyebabkan tidak semua perusahaan-perusahaan publik yang menerbitkan laporan tahunan maupun laporan keuangan mengungkapkan *intellectual capital* yang perusahaan miliki sehingga dapat menimbulkan asimetri informasi antara penyusun dan pengguna laporan.

Motivasi utama peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah adanya kelangkaan penelitian yang menguji pengaruh atribut *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital* di negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh atribut *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital* dengan mengikuti kode revisi *corporate governance* di Indonesia, karena restrukturisasi *corporate governance* diyakini menghasilkan pelaporan *intellectual capital* yang lebih baik (Burgman dan Roos, 2007). Penelitian ini juga berusaha memperluas penelitian sebelumnya secara metodologis dengan menggunakan analisis data panel dan secara kontekstual dengan mencari bukti dari negara berkembang.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) diperkenalkan pada tahun 1999 setelah krisis keuangan Asia 1997/1998. Pada tahun 2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dengan pertimbangan untuk memperluas cakupan ke tata kelola sektor publik (*public governance*). KNKG telah menerbitkan Pedoman Nasional *Good Corporate Governance* (Pedoman Nasional GCG) pertama kali pada tahun 1999, yang kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006. Penerapan *corporate governance* membentuk perusahaan untuk lebih transparan, bertanggung jawab, independen, dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Peneliti berpendapat bahwa apabila insiatif dan perubahan ini ditujukan untuk menghasilkan praktik *corporate governance* yang lebih baik, idealnya atribut *corporate governance* harus mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini karena pengungkapan dianggap sebagai bagian penting dari *corporate governance* yang baik (Patel *et al.*, 2002).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian ini berdasar pada teori keagenan, teori legitimasi, dan teori ketergantungan sumber daya. Teori keagenan menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Perbedaan kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen disebabkan karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu hubungan atau lembaga tertentu memiliki keunggulan informasi daripada pihak lain.

Teori legitimasi menunjukkan adanya kontrak sosial perusahaan dengan masyarakat untuk meningkatkan legitimasi perusahaan. Kontrak sosial digunakan untuk mewakili sejumlah besar harapan-harapan masyarakat. Perusahaan harus melakukan operasi atau aktivitas perusahaan dalam harapan dan norma-norma masyarakat luas. Apabila perusahaan sesuai dengan harapan dan norma-norma masyarakat, masyarakat akan mengizinkan perusahaan untuk melanjutkan aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus ikut serta terhadap lingkungan di mana perusahaan beroperasi (Deegan dan Samkin, dalam An *et al.*, 2011).

Teori ketergantungan sumber daya memandang bahwa adanya dewan yang lebih besar terkait dengan kinerja perusahaan yang lebih baik. Teori ketergantungan sumber daya (Pfeffer, 1972, 1973) menekankan bahwa dewan yang lebih besar akan meningkatkan keahlian dan menawarkan berbagai perspektif besar dalam pengambilan keputusan. Ukuran dewan direksi yang

lebih besar juga menawarkan peningkatan kapasitas pemantauan dalam menangani aktivitas perusahaan.

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Teori ketergantungan sumber daya (Pfeffer, 1972, 1973) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi yang lebih besar akan meningkatkan keahlian dan menawarkan berbagai perspektif besar untuk pengambilan keputusan. Ukuran dewan direksi yang lebih besar juga menawarkan peningkatan kapasitas pemantauan dalam menangani aktivitas perusahaan. Demikian pula, lebih banyak dewan direksi dalam struktur dewan perusahaan bisa mengkompensasi kekurangan individu dalam keterampilan melalui pengambilan keputusan kolektif dewan.

Penelitian Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013) menemukan pengaruh positif ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Konsisten dengan teori ketergantungan sumber daya, peneliti berharap ada pengaruh positif ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Oleh karena itu, berikut hipotesis dirumuskan dalam bentuk alternatif:

H1. Ada pengaruh positif ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan intellectual capital.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Komisaris independen memiliki peran utama untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham terlindung dengan baik (Fama, 1980). Dari perspektif pengungkapan, komisaris independen diharapkan dapat menekan perusahaan untuk terlibat dalam pengungkapan tambahan (Haniffa dan Cooke, dalam Haji, A.A dan Mohd Ghazali, 2013). Li *et al.* (2008) berpendapat bahwa keahlian yang lebih luas dan pengalaman komisaris independen akan mendorong manajemen untuk mengambil posisi pengungkapan tambahan, kepatuhan kritis dengan norma-norma yang ditentukan ke posisi yang lebih proaktif untuk mencerminkan relevansi nilai *intellectual capital* bagi para pemangku kepentingan. Penelitian Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013) menemukan pengaruh positif komisaris independen terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Oleh karena itu, berikut hipotesis dirumuskan dalam bentuk alternatif:

H2. Ada pengaruh positif komisaris independen terhadap pengungkapan intellectual capital.

Pengaruh Hubungan Keluarga di Dewan terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Kehadiran anggota keluarga pada struktur dewan perusahaan merupakan fitur tradisional dalam lingkungan bisnis di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Adanya kehadiran anggota keluarga dalam dewan memiliki pengaruh terhadap praktik pengungkapan (Haniffa dan Cooke, dalam Haji, A.A dan Mohd Ghazali, 2013). Perusahaan yang memiliki persentase hubungan keluarga di dewan yang lebih tinggi dapat dikatakan telah terkonsentrasi kepemilikan karena mempunyai tingkat konflik kepentingan yang lebih rendah. Hal ini akan menyebabkan kebutuhan untuk mengungkapkan informasi tambahan mungkin berkurang (Mohd Ghazali dan Weetman, 2006). Penelitian Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013) tidak menemukan pengaruh negatif signifikan hubungan keluarga di dewan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Oleh karena itu, berikut hipotesis dikembangkan dalam bentuk alternatif:

H3. Ada pengaruh negatif hubungan keluarga di dewan terhadap pengungkapan intellectual capital.

Pengaruh Rapat Dewan Direksi terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Teori keagenan menyiratkan bahwa meskipun tujuan utama dari manajer (agen) adalah memaksimalkan kepentingan masing-masing, para manajer juga akan bertindak dengan berbagai cara untuk menyenangkan para pemegang saham (prinsipal). Salah satu cara untuk membangun hubungan yang sehat dengan prinsipal adalah dengan menunjukkan komitmen anggota dewan melalui frekuensi sering mengadakan rapat dewan direksi dalam membahas masalah perusahaan. Frekuensi rapat dewan direksi dapat menjadi bukti bahwa anggota dewan berkomitmen dan aktif dalam mengelola perusahaan (Khanchei, dalam Haji, A.A dan Mohd Ghazali, 2013). Hal ini akan menyediakan pintu untuk meningkatkan kapasitas pemantauan dan mengatasi masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Penelitian Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013) menemukan pengaruh positif rapat dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Oleh karena itu, berikut hipotesis dirumuskan dalam bentuk alternatif:

H4. Ada pengaruh positif rapat dewan direksi terhadap pengungkapan intellectual capital.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Pemilik yang mengelola perusahaan adalah fitur umum di lingkungan perusahaan Indonesia. Persentase saham yang dimiliki oleh manajer, dewan direksi, dan dewan komisaris adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kepemilikan manajerial (Eng dan Mak, dalam Haji, A.A dan Mohd Ghazali, 2013). Teori keagenan menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang lebih tinggi akan menghasilkan konflik keagenan yang lebih rendah karena manajer akan memiliki lebih banyak insentif untuk memaksimalkan kinerja. Oleh karena itu, pemegang saham eksternal mungkin tidak memerlukan informasi tambahan untuk pemantauan perilaku manajer (agen). Adanya pemilik yang mengelola perusahaan cenderung akan memiliki lebih sedikit insentif untuk memberikan pengungkapan sukarela (Mohd Ghazali, 2007). Hal ini disebabkan karena pemilik bisa mendapatkan informasi melalui saluran informal. Penelitian Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013) menemukan pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Oleh karena itu, berikut hipotesis dirumuskan dalam bentuk alternatif:

H5. Ada pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan intellectual capital.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Di Indonesia kepemilikan pemerintah dibuktikan dalam perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan pengendali langsung atas perusahaan-perusahaan ini. Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat luas sehingga pemerintah merasakan tekanan tambahan untuk mendorong investasi pada *intellectual capital*, seperti pembangunan modal manusia. Harapan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengubah negara menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, dapat diharapkan bahwa perusahaan-perusahaan di mana pemerintah adalah pemegang saham mayoritas akan memiliki investasi yang lebih tinggi pada *intellectual capital*. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan untuk melegitimasi kegiatan pemerintah. Penelitian Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013) menemukan pengaruh positif kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Oleh karena itu, berikut hipotesis dirumuskan dalam bentuk alternatif:

H6. Ada pengaruh positif kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan intellectual capital.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Di pasar modal Indonesia telah terdapat peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham institusional. Pemilik institusional memainkan peran signifikan atas *corporate governance* dan praktik pengungkapan karena cenderung untuk menggunakan hal ini sebagai alat untuk memantau agen (Saleh *et al.*, 2010). Secara khusus, pengungkapan tambahan digunakan sebagai mekanisme untuk memantau perusahaan oleh pemegang saham institusional. Pengungkapan informasi tambahan termasuk investasi pada *intellectual capital* dapat membantu investor institusional dalam pengambilan keputusan atas kinerja manajemen. Penelitian Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013) menemukan pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Oleh karena itu, berikut hipotesis dirumuskan dalam bentuk alternatif:

H7. Ada pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan intellectual capital.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian dalam penelitian ini adalah pengungkapan *intellectual capital* yang dijabarkan lagi menjadi 2 proksi variabel dependen, yaitu tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Tingkat pengungkapan *intellectual capital* dilambangkan dalam EICD dan kualitas pengungkapan *intellectual capital* dilambangkan dalam QICD. Teknik analisis konten digunakan untuk memperoleh data mengenai pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian ini menggunakan kategori komponen *intellectual capital* Sveiby (1997) yang dikembangkan oleh Li *et al.* (2008) dengan menggunakan kategori 40 indeks, yaitu 9 indeks untuk *internal capital*, 17 indeks untuk *eksternal capital*, dan 14 indeks untuk *human capital*.

Tingkat pengungkapan *intellectual capital* adalah jumlah item dalam indeks yang diungkapkan dan dibagi dengan skor maksimum yang mungkin (yaitu 40). Variabel ini diukur dengan menggunakan pendekatan dikotomis (*dichotomous approach*). Pendekatan dikotomis digunakan untuk memberi skor tingkat pengungkapan *intellectual capital*, yaitu nilai 0 diberikan apabila item pengungkapan *intellectual capital* tidak muncul dalam laporan tahunan dan nilai 1 diberikan apabila item pengungkapan *intellectual capital* diungkapkan. Kualitas pengungkapan *intellectual capital* adalah jumlah item dalam daftar yang diungkapkan berdasarkan skala 0-3 dan dibagi dengan skor maksimum yang mungkin (yaitu 120). Variabel ini diukur dengan menggunakan pendekatan pembobotan (*weighting approach*). Pendekatan pembobotan ini menggunakan skala empat poin (skala 0-3). Nilai 0 diberikan apabila item pengungkapan *intellectual capital* tidak muncul dalam laporan keuangan, nilai 1 diberikan apabila item tersebut muncul dalam bentuk narasi, nilai 2 diberikan apabila item tersebut diungkapkan dalam istilah numerik, dan nilai 3 sebagai nilai tertinggi diberikan apabila item tersebut diungkapkan dalam satuan moneter (mata uang).

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi, komisaris independen, hubungan keluarga di dewan, rapat dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan institusional. Ukuran dewan direksi diukur dengan menghitung jumlah total dewan direksi dalam struktur dewan perusahaan. Komisaris independen diukur berdasarkan persentase komisaris independen dalam struktur dewan komisaris perusahaan. Hubungan keluarga di dewan diukur berdasarkan persentase hubungan keluarga antara dewan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham kendali di struktur dewan terhadap jumlah total struktur dewan perusahaan. Rapat dewan direksi diukur dengan menghitung jumlah total diadakannya rapat dewan direksi. Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh manajer, dewan direksi, dan dewan komisaris dalam perusahaan. Kepemilikan pemerintah diukur dengan memberikan nilai 1 apabila kepemilikan saham pemerintah sebesar 5% atau lebih dan nilai 0 pada kepemilikan saham pemerintah kurang dari 5%. Dan kepemilikan institusional diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan ekuitas 5% atau lebih.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Ukuran perusahaan diukur dengan total aset yang disajikan dalam neraca akhir tahun. Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio laba bersih terhadap total ekuitas perusahaan. Dan *leverage* diukur dengan menggunakan rasio antara total hutang terhadap total aset.

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria. Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempunyai tingkat kapitalisasi pasar tinggi pada tahun 2011-2013.
2. Perusahaan yang memiliki data lengkap mengenai pelaksanaan *corporate governance*, yaitu tentang ukuran dewan direksi, komisaris independen, hubungan keluarga di dewan, jumlah rapat dewan direksi, jumlah kepemilikan saham oleh manajerial, jumlah kepemilikan saham oleh pemerintah, dan jumlah kepemilikan saham institusional.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan dua model sebagai berikut:

1. Model 1

$$\text{EICD} = + 1\text{BSIZE} + 2\text{INDs} + 3\text{FMB} + 4\text{BMEETING} + 5\text{MANOWN} + 6\text{GOVOWN} + 7\text{IOWN} + 8\text{SIZE} + 9\text{ROE} + 10\text{LEV} + e$$

2. Model 2

$$\text{QICD} = + 1\text{BSIZE} + 2\text{INDs} + 3\text{FMB} + 4\text{BMEETING} + 5\text{MANOWN} + 6\text{GOVOWN} + 7\text{IOWN} + 8\text{SIZE} + 9\text{ROE} + 10\text{LEV} + e$$

Keterangan:

EICD	: Tingkat pengungkapan <i>intellectual capital</i>
QICD	: Kualitas pengungkapan <i>intellectual capital</i>
BSIZE	: Jumlah dewan direksi
INDs	: Proporsi komisaris independen
FMB	: Proporsi hubungan keluarga di dewan
BMEETING	: Jumlah rapat dewan direksi
MANOWN	: Proporsi kepemilikan manajerial
GOVOWN	: Proporsi kepemilikan pemerintah
IOWN	: Proporsi kepemilikan institusional
SIZE	: Ukuran perusahaan
ROE	: Profitabilitas (<i>Return on Equity</i>)
LEV	: <i>Leverage</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Deskripsi Sampel Penelitian**

Berdasarkan pada metode purposive sampling yang telah dilakukan, jumlah sampel penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perincian Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan yang mempunyai tingkat kapitalisasi pasar tinggi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013	37
Tidak memiliki kelengkapan data mengenai <i>corporate governance</i>	(7)
Jumlah perusahaan sampel	30
Jumlah sampel 2011-2013 (3x30)	90
Laporan tahunan tidak tersedia di BEI	(1)
Jumlah sampel yang tersedia	89
Data outlier	(1)
Sampel akhir	88

Sumber: Data yang diolah, 2014

Berdasarkan sampel yang telah diamati maka ditetapkan 89 data yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah melalui tahap pengolahan data, terdapat 1 sampel yang menjadi outlier yang dikeluarkan dari sampel penelitian, sehingga jumlah sampel akhir yang layak diobservasi yaitu 88 sampel. 88 sampel tersebut selanjutnya digunakan untuk analisis dan pengujian hipotesis.

Deskripsi Variabel

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviation
EICD	0.4750	1.0000	0.776989	0.1402083
QICD	0.2500	0.6917	0.438826	0.1002781
BSIZE	4	12	7.78	2.277
INDs	0.1667	80.5300	1.337437	8.5397896
FMB	0.0000	0.6875	0.073055	0.1548813
BMEETING	1	75	29.92	18.520
DIROWN	0.0000	15.1600	0.444374	2.1191664
GOVOWN	0	1	0.25	0.435
IOWN	12.5100	99.3700	63.095147	21.9277771
SIZE	3470	733100	110636.10	168148.590
ROE	3.6465	125.7814	26.058393	20.0701114
LEV	8.3798	98.0057	50.153517	26.1896466

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Tingkat pengungkapan *intellectual capital* (EICD) mempunyai nilai terendah 0,4750 dan nilai tertinggi sebesar 1. Rata-rata tingkat pengungkapan *intellectual capital* sebesar 0,776989 dan standar deviasi 0,1402083. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan adanya simpangan data yang relative kecil, artinya nilai dari setiap sampel berada disekitar rata-rata hitungannya. Kualitas pengungkapan *intellectual capital* (QICD) mempunyai nilai terendah 0,25 dan nilai tertinggi 0,6917. Rata-rata kualitas pengungkapan *intellectual capital* sebesar 0,438826 dan standar deviasi 0,1002781. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan adanya simpangan data yang relative kecil, artinya nilai dari setiap sampel berada disekitar rata-rata hitungannya.

Ukuran dewan direksi (BSIZE) mempunyai nilai terendah 4 dan nilai tertinggi 12. Rata-rata ukuran dewan direksi sebesar 7,78 dan standar deviasi 2,277. Proporsi komisaris independen (INDs) mempunyai nilai terendah 0,1667 dan nilai tertinggi 80,53. Rata-rata proporsi komisaris independen sebesar 1,337437 dan standar deviasi 8,5397896. Proporsi hubungan keluarga di dewan (FMB) mempunyai nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 0,6875. Rata-rata proporsi hubungan keluarga di dewan sebesar 0,073055 dan standar deviasi 0,1548813. Rapat dewan direksi (BMEETING) mempunyai nilai terendah 1 dan nilai tertinggi 75. Rata-rata rapat dewan direksi sebesar 29,92 dan standar deviasi 18,520. Kepemilikan manajerial (MANOWN) mempunyai nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 15,16. Rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 0,444374 dan standar deviasi 2,1191664. Kepemilikan pemerintah (GOVOWN) menggunakan pengukuran variabel dummy, sehingga memiliki nilai minimum 0 dan nilai tertinggi 1. Rata-rata kepemilikan pemerintah sebesar 0,25 dan standar deviasi 0,435. Kepemilikan institusional (IOWN) mempunyai nilai terendah 12,51 dan nilai tertinggi 99,37. Rata-rata kepemilikan institusional sebesar 63,095147 dan standar deviasi 21,9277771.

Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai minimum 3470 dan nilai tertinggi 733100. Rata-rata ukuran perusahaan sebesar 110636,1 dan standar deviasi 168148,59. *Return on equity* (ROE) mempunyai nilai terendah 3,6465 dan nilai tertinggi 125,7814. Rata-rata *return on equity* sebesar 26,058393 dan standar deviasi 20,0701114. *Leverage* (LEV) mempunyai nilai terendah 8,3798 dan nilai tertinggi 98,0057. Rata-rata *leverage* sebesar 50,153517 dan standar deviasi 26,1896466.

Pembahasan Hasil Penelitian

Kedua model persamaan regresi telah memenuhi uji asumsi klasik. Oleh karena itu, berikut hasil uji hipotesis pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis

Model	EICD		QICD	
		Sig.		Sig.
BSIZE	0,190	0,010	0,197	0,022
INDs	0,019	0,524	0,028	0,424
FMB	-0,157	0,228	-0,275	0,075
BMEETING	0,004	0,004	0,005	0,003
MANOWN	0,015	0,092	0,019	0,064
GOVOWN	0,202	0,002	0,263	0,001
IOWN	0,004	0,001	0,005	0,000
SIZE	-0,007	0,079	-0,007	0,195
ROE	0,001	0,271	0,001	0,327
LEV	0,000	0,711	0,000	0,782

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan hasil pengolahan data model 1 dan 2 hipotesis satu (H1) diterima pada tingkat pengungkapan *intellectual capital* (EICD) dan kualitas pengungkapan *intellectual capital* (QICD). Nilai *p-value* pada EICD dan QICD secara berturut-turut sebesar 0,010 dan 0,022. Kedua variabel memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hipotesis satu (H1) diterima karena model 1 dan 2 memiliki arah t positif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi yang lebih besar berpengaruh positif terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori ketergantungan sumber daya yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi yang lebih besar akan meningkatkan keahlian dan menawarkan berbagai perspektif besar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ukuran dewan direksi yang lebih besar juga menawarkan peningkatan kapasitas pemantauan dalam menangani aktivitas perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Abeysekera (2010), Hidalgo *et al.* (2011), Abdul Rashid *et al.* (2012), dan Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013). Sejumlah penelitian tersebut menemukan bahwa ukuran dewan direksi yang lebih besar berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*, karena ukuran dewan direksi yang lebih besar terkait dengan kinerja organisasi yang lebih baik.

Hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan hasil pengolahan data model 1 dan 2 hipotesis dua (H2) ditolak pada tingkat pengungkapan *intellectual capital* (EICD) dan kualitas pengungkapan *intellectual capital* (QICD). Nilai *p-value* pada EICD dan QICD secara berturut-turut sebesar 0,524 dan 0,424. Kedua variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terdapat pengaruh positif komisaris independen terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, tidak menjamin terwakilinya kepentingan pemegang saham sehingga fungsi *monitoring* dan *internal control* manajemen tingkat atas yang diharapkan tidak berjalan dengan baik.

Hasil analisis ini bertolak belakang dengan penelitian Cerbioni dan Parbonetti (2007), Li *et al.* (2008), dan Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013), namun sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hidalgo *et al.* (2011) dan Taliyang dan Jusop (2011) yang menemukan pengaruh tidak signifikan proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan *intellectual capital* di Meksiko dan Malaysia. Hal tersebut didukung juga oleh penelitian Nugroho (2011), Sari (2011) dan Arifah (2012) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini mendukung penjelasan yang telah ada bahwa belum efektifnya fungsi komisaris independen dalam perusahaan sebagai alat monitor dikarenakan pengangkatan komisaris independen hanya untuk memenuhi aturan *corporate governance* saja, tidak untuk menegakkan *corporate governance*. Komisaris independen yang ditunjuk oleh dewan komisaris perusahaan dinilai kurang begitu berperan dalam fungsi pengawasan dan monitoring karena kurangnya komunikasi dan koordinasi dewan komisaris, sehingga komisaris independen dalam menjalankan fungsinya menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen yang belum dapat berjalan efektif ini menyebabkan ekspektasi bahwa komisaris independen mendorong pengungkapan *intellectual capital* tidak terwujud.

Hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa hubungan keluarga di dewan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan hasil pengolahan data model 1 hipotesis tiga (H3) ditolak pada tingkat pengungkapan *intellectual capital* (EICD), sedangkan model 2 hipotesis tiga (H3) diterima pada kualitas pengungkapan *intellectual capital* (QICD). Nilai *p-value* pada EICD dan QICD secara berturut-turut sebesar 0,228 dan 0,075. Pada model 1 variabel hubungan keluarga di dewan memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terdapat pengaruh hubungan keluarga di dewan terhadap tingkat pengungkapan *intellectual capital*. Sedangkan pada model 2 variabel hubungan keluarga di dewan memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,10 artinya terdapat pengaruh hubungan keluarga di dewan terhadap kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Model 2 hipotesis tiga (H3) diterima karena memiliki arah t negatif.

Hasil penelitian pada model 1 hipotesis tiga (H3) menunjukkan bahwa hubungan keluarga di dewan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013) yang menyatakan bahwa hubungan keluarga di dewan tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sedangkan hasil penelitian pada model 2 hipotesis tiga (H3) menunjukkan bahwa hubungan keluarga di dewan berpengaruh negatif terhadap kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ho dan Wong (2001), Haniffa dan Cooke (2002), dan Mohd Ghazali dan Weetman (2006). Hasil penelitian ini konsisten karena sejumlah penelitian melaporkan pengaruh negatif signifikan hubungan keluarga di dewan terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan persentase hubungan keluarga di dewan yang lebih tinggi akan kurang memberikan informasi sukarela karena terdapat konflik kepentingan yang lebih rendah. Oleh karena itu, informasi mengenai perusahaan dapat diperoleh melalui saluran informal.

Hipotesis empat (H4) menyatakan bahwa rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan hasil pengolahan data model 1 dan 2 hipotesis dua (H2) diterima pada tingkat pengungkapan *intellectual capital* (EICD) dan kualitas pengungkapan *intellectual capital* (QICD). Nilai *p-value* pada EICD dan QICD secara berturut-turut sebesar 0,004 dan 0,003. Kedua variabel memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat pengaruh positif rapat dewan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hipotesis empat (H4) diterima karena model 1 dan 2 memiliki arah *t* positif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rapat dewan direksi berpengaruh positif terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa meskipun tujuan utama dari agen (manajer) adalah untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing, para manajer juga akan bertindak dengan berbagai cara yang akan menyenangkan para prinsipal (pemegang saham). Rapat dewan direksi merupakan salah satu cara untuk membangun hubungan yang sehat dengan prinsipal untuk membahas masalah organisasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Li *et al.* (2008), Taliyang dan Jusop (2011), dan Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013). Penelitian-penelitian ini melaporkan pengaruh positif yang signifikan antara frekuensi rapat dewan direksi terhadap tingkat pengungkapan *intellectual capital* di Inggris dan Malaysia.

Hipotesis lima (H5) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan hasil pengolahan data model 1 dan 2 hipotesis dua (H2) ditolak pada tingkat pengungkapan *intellectual capital* (EICD) dan kualitas pengungkapan *intellectual capital* (QICD). Nilai *p-value* pada EICD dan QICD secara berturut-turut sebesar 0,092 dan 0,064. Kedua variabel memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,10 artinya terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Namun, hipotesis lima (H5) ditolak karena model 1 dan 2 memiliki arah *t* positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan direksi berpengaruh positif terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Kepemilikan manajerial yang lebih besar akan mendorong pihak manajerial untuk semakin meningkatkan kinerjanya, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Haji, A.A dan Mohd Ghazali yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Namun, hasil penelitian ini mendukung penelitian Nugroho (2011) yang menemukan hubungan positif antara tingkat kepemilikan manajerial dengan pengungkapan *intellectual capital*. Kepemilikan manajerial yang lebih besar terkait dengan kinerja perusahaan yang lebih baik, karena manajer eksekutif (dewan direksi) mempunyai kekuasaan dan kontrol sebagian besar keputusan di dalam perusahaan. Oleh karena itu, apabila kepemilikan manajerial meningkat, pihak manajerial akan lebih mau meningkatkan aktivitas penciptaan nilai yang dapat meningkatkan manfaat kompetitif di masa depan. Dalam hal ini aktivitas tersebut akan meningkatkan informasi *intellectual capital* perusahaan.

Hipotesis enam (H6) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan hasil pengolahan data model 1 dan 2 hipotesis dua (H2) diterima pada tingkat pengungkapan *intellectual capital* (EICD) dan kualitas pengungkapan *intellectual capital* (QICD). Nilai *p-value* pada EICD dan QICD secara berturut-



turut sebesar 0,002 dan 0,001. Kedua variabel memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya terdapat pengaruh positif kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hipotesis lima (H5) diterima karena model 1 dan 2 memiliki arah t positif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat dan sebagai hasilnya mungkin merasakan tekanan tambahan untuk mendorong investasi pada *intellectual capital* seperti pembangunan modal manusia. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mohd Ghazali (2007), Amran dan Devi (2008), Yau *et al.* (2009), dan Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013) yang menyatakan bahwa perusahaan dimana pemerintah adalah pemegang saham mayoritas akan mengungkapkan lebih informasi *intellectual capital*.

Hipotesis tujuh (H7) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan hasil pengolahan data model 1 dan 2 hipotesis dua (H2) diterima pada tingkat pengungkapan *intellectual capital* (EICD) dan kualitas pengungkapan *intellectual capital* (QICD). Nilai *p-value* pada EICD dan QICD secara berturut-turut sebesar 0,001 dan 0,000. Kedua variabel memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,01 artinya terdapat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hipotesis tujuh (H7) diterima karena model 1 dan 2 memiliki arah t positif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa pengungkapan ini merupakan proses legitimasi perusahaan bagi investor institusi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Saleh *et al.* (2010) dan Haji, A.A dan Mohd Ghazali (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan *intellectual capital*. Hubungan keluarga di dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *intellectual capital*. Dan hubungan keluarga di dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas pengungkapan *intellectual capital*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, sebagai berikut: *Pertama*, sampel penelitian ini hanya menganalisis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013 dan mempunyai tingkat kapitalisasi pasar yang tinggi sebagai sampel penelitian sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. *Kedua*, terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi masing-masing peneliti dalam menganalisis dan mengidentifikasi item pengungkapan *intellectual capital* pada laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan.

Atas dasar keterbatasan tersebut, maka saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu disarankan menambah kategori perusahaan yang diteliti sehingga tidak terbatas hanya untuk perusahaan yang mempunyai tingkat kapitalisasi pasar yang tinggi dan disarankan untuk memperpanjang tahun pengamatan sehingga memperoleh jumlah sampel yang lebih besar. Selain itu dengan menggunakan data panel yang lebih panjang akan memberikan kemampuan prediksi yang lebih baik.

REFERENSI

- Abdul Rashid, A., Ibrahim, M.K., R dan See, K.F. 2012. "IC disclosures in IPO prospectuses: evidence from Malaysia". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 7.
- Abeysekera, I. 2010. "The influence of board size on intellectual capital disclosure by Kenyan listed firms". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 11.



- Abeysekera, I. dan Guthrie, J. 2005. "An empirical investigation of annual reporting trends of intellectual capital in Sri Lanka". *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 16.
- An, Y., Davey, H., dan Eggleton, I.R.C. 2011. "Towards a comprehensive theoretical framework for voluntary IC disclosure". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 12.
- Arifah, Dista Amalia. 2012. "Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan intellectual capital: pada perusahaan IC intensive", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9.
- Burgman, R. dan Roos, G. 2007. "The importance of intellectual capital reporting: evidence and implications". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 8.
- Cerbioni, F. dan Parbonetti A. 2007. "Exploring the effects of corporate governance on intellectual capital disclosure: an analysis of European biotechnology companies". *European Accounting Review*, Vol. 16.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goh, P.C dan Lim, K.P. 2004. "Disclosing intellectual capital in company annual reports: evidence from Malaysia", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 5.
- Haji, A.A dan Nazli A. Mohd Ghazali. 2013. "A longitudinal examination of intellectual capital disclosures and corporate governance attributes in Malaysia". *Asian Review of Accounting*, Vol. 21.
- Hidalgo, R.L, Garcia-Meca, E. Dan Martinez, I. 2011. "Corporate governance and intellectual capital disclosure", *Journal of Business Ethics*, Vol 100.
- Ho, S.M dan Wong, K.S. 2001. "A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure", *Journal of Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 10.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Li., J., Pike R. dan Haniffa, R. 2008. "Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms". *Accounting and Business Research*, Vol. 38
- Mohd Ghazali, N.A. 2007. "Ownership structure and corporate social responsibility disclosure some Malaysian evidence". *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, Vol. 7.
- Mohd Ghazali, N.A. dan Weetman, P. 2006. "Perpetuating traditional influences: voluntary disclosure in Malaysia following the economics crisis". *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*, Vol. 15.
- Nugroho, Bangkit. 2011. Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Intellectual Capital Disclosure pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi S1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Ousama, A.A., Fatima, A.H., dan Hafiz Madji, A.R. 2011. "Usefulness of intellectual capital information: preparers' and users' views". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 12.
- Patel, S.A., Balic A. dan Bwakira L. 2002. "Measuring transparency and disclosure at firm level in emerging markets", *Emerging Markets Review*, Vol. 3.
- Pfeffer, J. 1972. "Size and composition of corporate boards of directors: the organization and its environment". *Administrative Science Quarterly*, Vol. 17.
- Pfeffer, J. 1973. "Size, composition and function of hospital boards of directors: a study of organization-environment linkage". *Administrative Science Quarterly*, Vol. 18.
- Saleh, M., Zulkifli, N., dan Muhamad, R. 2010. Corporate social responsibility disclosure: evidence from public listed companies in Malaysia". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 25.
- Taliyang, S.M dan Jusop, M. 2011. "Intellectual capital disclosure and corporate governance structure: evidence in Malaysia". *International Journal of Business and Management*, Vol.6.